



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah

Rencana Kerja (Renja) SKPD
merupakan **dokumen perencanaan SKPD** untuk
periode 1 (satu) tahun.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000.7.2/252/Bappeda-G. ST/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta adanya perubahan kebijakan nasional/daerah, kondisi dan kebutuhan pembangunan, serta penyesuaian anggaran, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

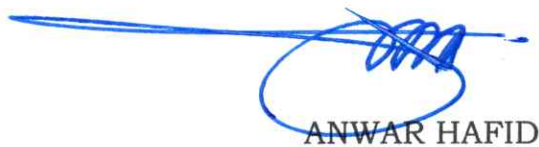
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 000.7.2/252/Bappeda-9.9/2025
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

1. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Perubahan Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Perubahan Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

21. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
22. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Perubahan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Perubahan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
38. Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunianya, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Kerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang penanggulangan bencana pada tahun 2025. Penyusunan Renja bertujuan agar seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait lainnya, memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Kami menyadari bahwa renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen untuk perbaikan Renja tahun yang akan datang. Demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu , 30 Oktober 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

Pembina Utama Muda
Nip. 19671026 199403 1 008

RENJA PERUBAHAN 2025

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 LANDASAN HUKUM	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	15
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	15
2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Prov. Sulteng	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Prov. Sulteng	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program	32
BAB III	33
TUJUAN DAN SASARAN	33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Prov. Sulteng	33
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	34
BAB IV	42
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	42
BAB V	43
PENUTUP	43
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.	43
5.2 Rencana tindak lanjut	43

RENJA PERUBAHAN 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1	16
Tabel 2 2	28
Tabel 3 1	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

RENJA PERUBAHAN 2025

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

RENJA PERUBAHAN 2025

- 20) Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/2008;
- 21) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
- 22) Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
- 23) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2022;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

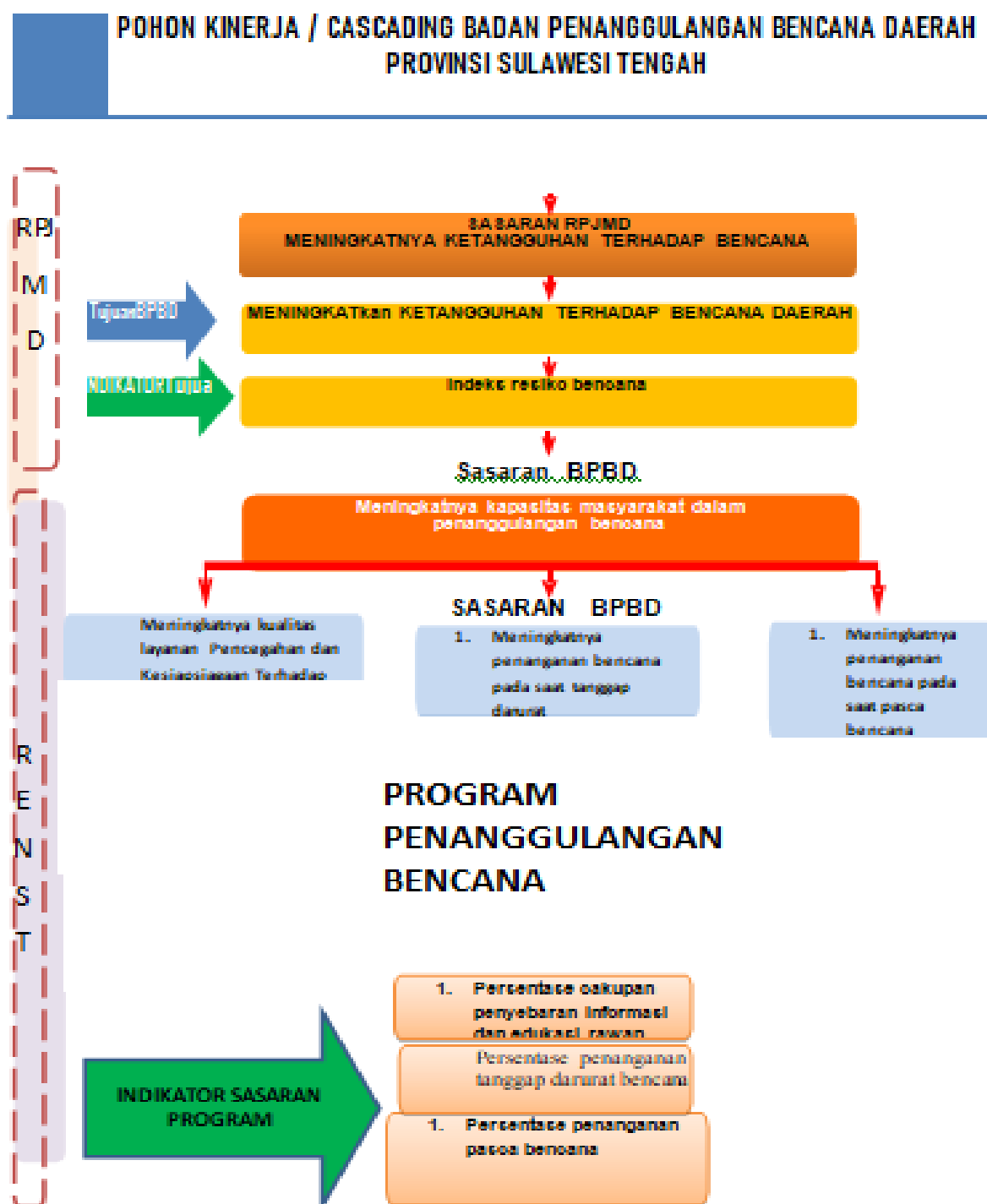
Maksud dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022 – 2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan Perangkat Daerah.
- b. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 – 2026.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah untuk menghasilkan pedoman dalam :

1. pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2. pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha Pengurangan risiko dan mitigasi serta penanganan kedaruratan bencana;
4. Membangun sistem informasi penanggulangan bencana di daerah-daerah kabupaten/kota yang rawan bencana;
5. Pembentukan wilayah-wilayah penanganan bencana dengan dukungan peralatan dan logistik yang memadai bagi Kabupaten/Kota.

1.4 CASCADING



RENJA PERUBAHAN 2025

KEGIATAN : PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI	• INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Mitigasi Struktural dan Non Struktural
SUB KEGIATAN :	• INDIKATOR SUB KEGIATAN :
Penyusunan Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	• Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	• Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Propinsi dan Kabupaten / Kota yang memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	• Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	• Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana
Pengelolaan Risiko Bencana	• Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	• Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

RENJA PERUBAHAN 2025

KEGIATAN :
PENANGANAN PASCA BENCANA PROVINSI

• INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah Kab/Kota yang dilakukan yang tertangani

SUB KEGIATAN :

• INDIKATOR SUB KEGIATAN :

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
(TRC) Bencana

• Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana

Penyusunan Rencana Kontinjensi

• Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

• Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan

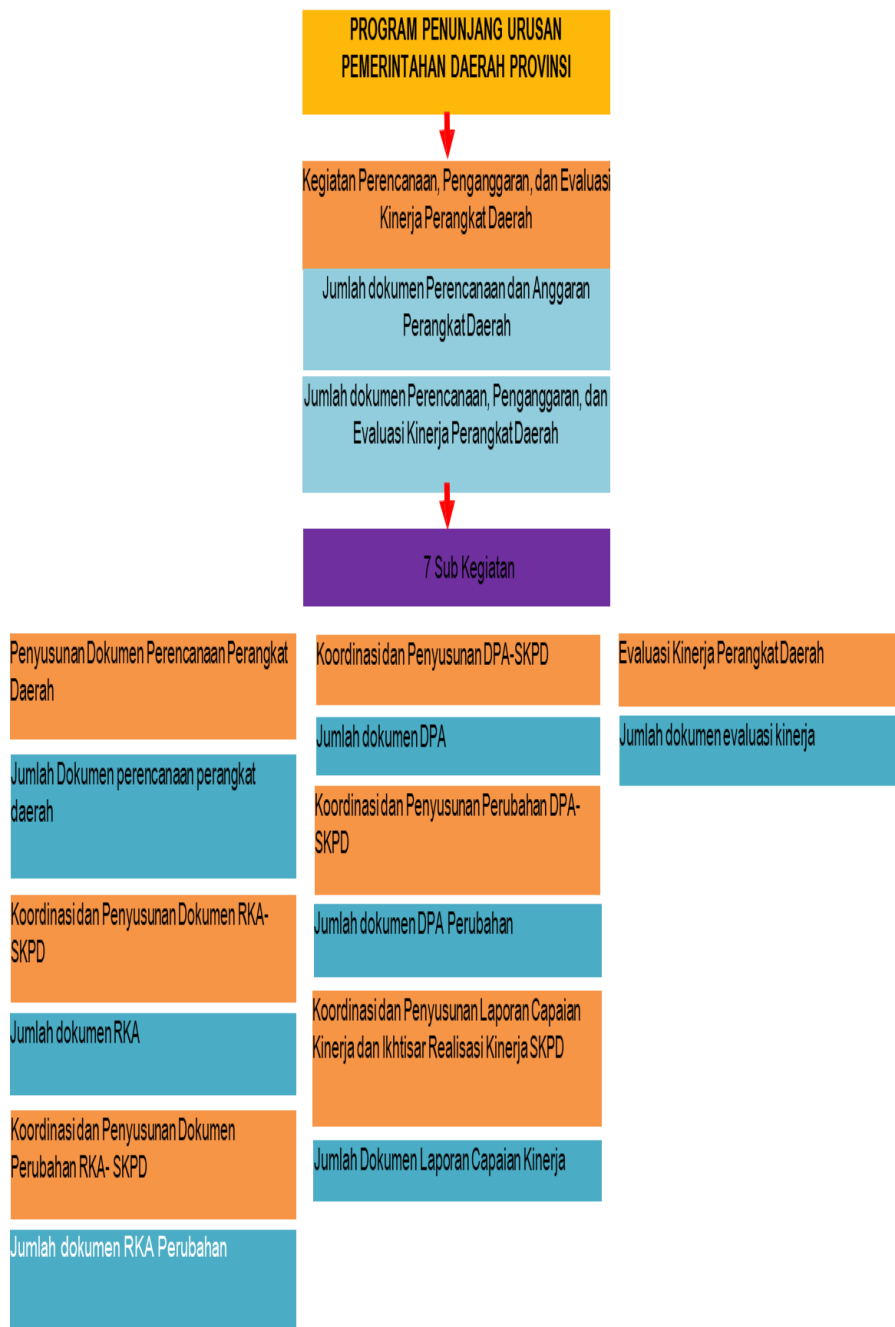
RENJA PERUBAHAN 2025

KEGIATAN : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	• INDIKATOR KEGIATAN : Rata - rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat pe 100.000 penduduk wilayah terdampak
SUB KEGIATAN :	• INDIKATOR SUB KEGIATAN :
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	• Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	• jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	• Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	• Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	• Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

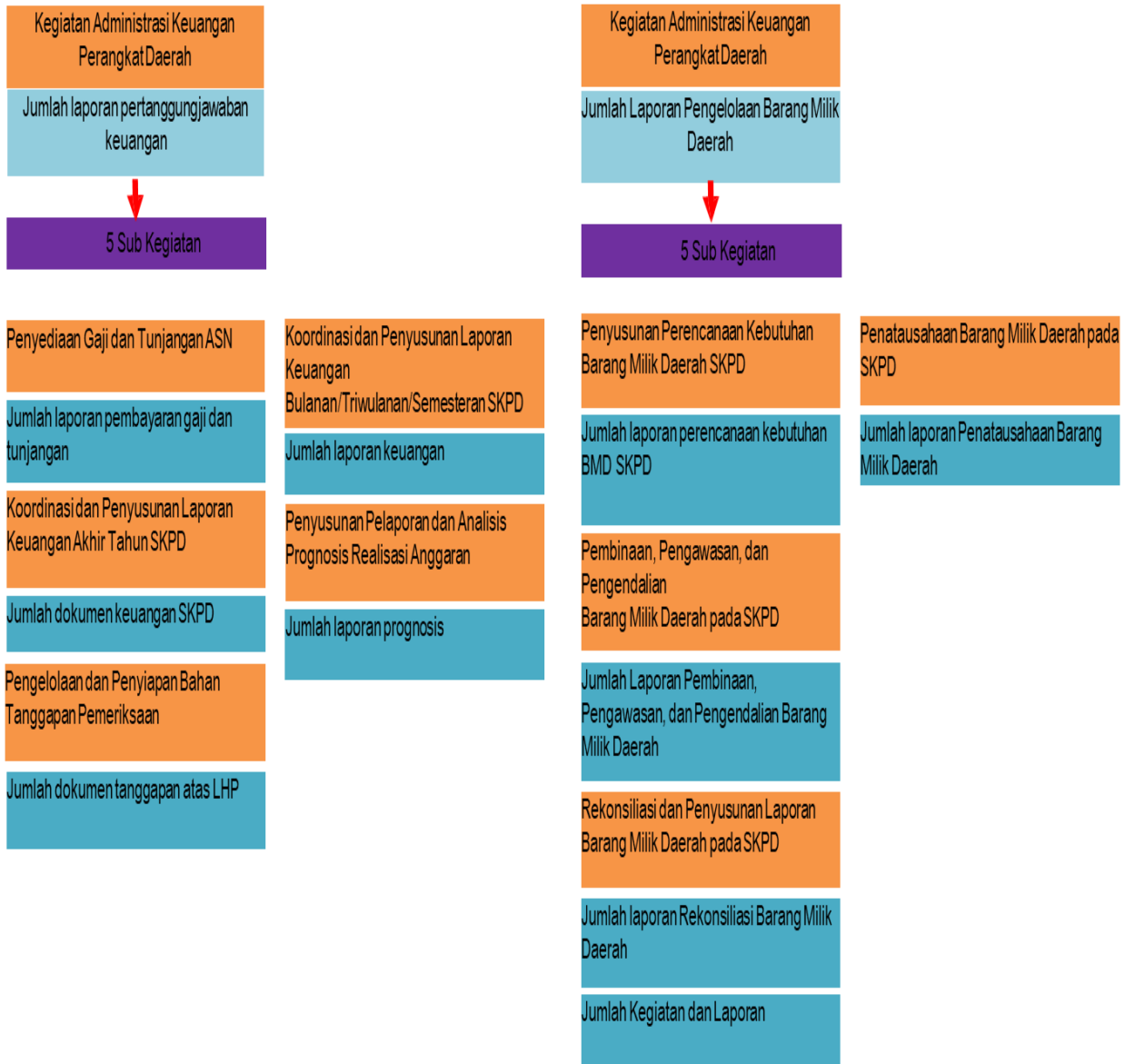
RENJA PERUBAHAN 2025

KEGIATAN : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	• INDIKATOR KEGIATAN : Rata rata kenaikan Indeks pemulihan Pasca Bencana
SUB KEGIATAN :	• INDIKATOR SUB KEGIATAN :
Penyusunan Perencanaan dan kebijakan Penanggulangan Bencana	• Jumlah Dokumen Perencanaan dan kebijakan Penanggulangan Bencana
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	• Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	• Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	• Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	• Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	• Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	• Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun

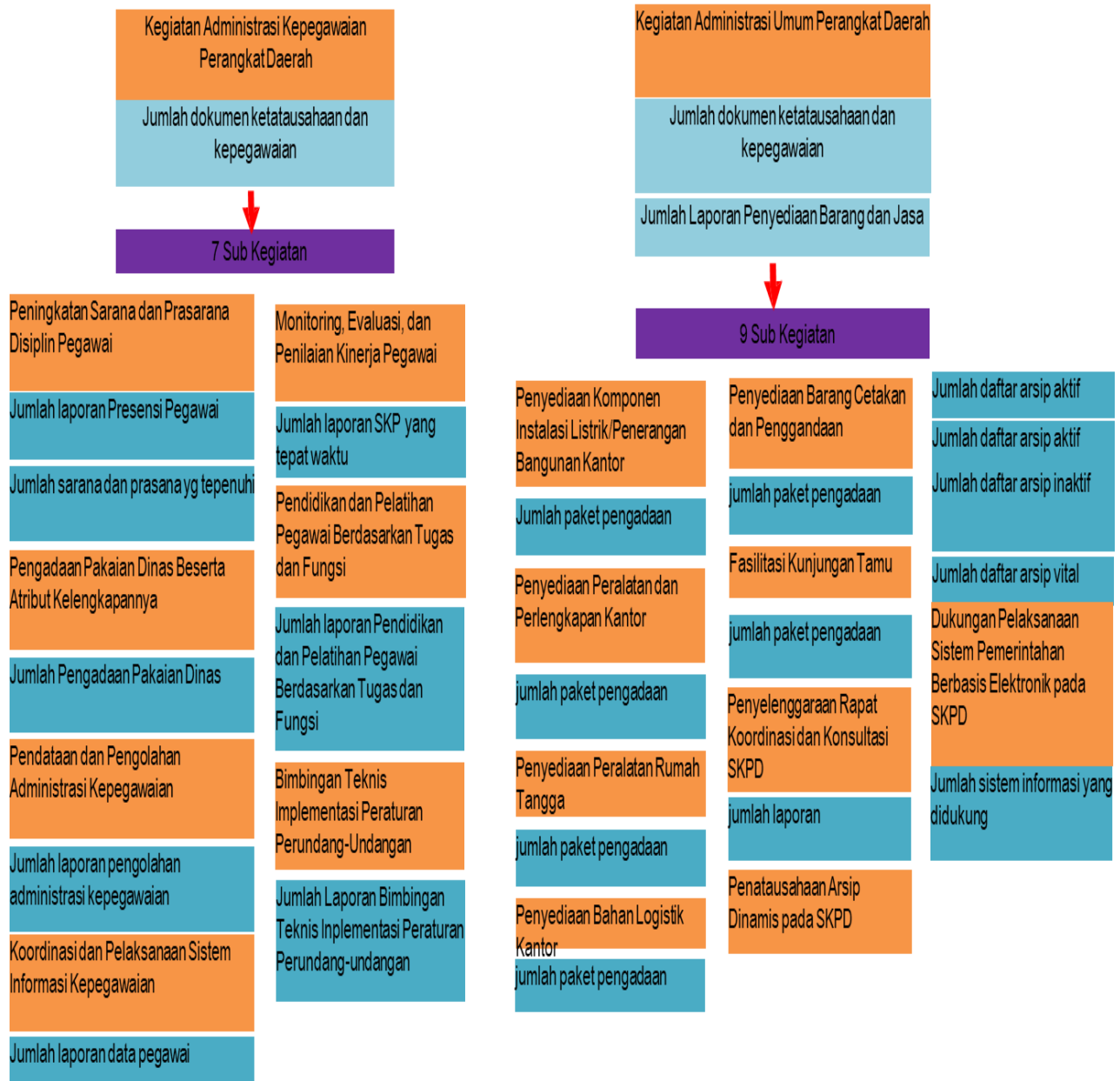
RENJA PERUBAHAN 2025



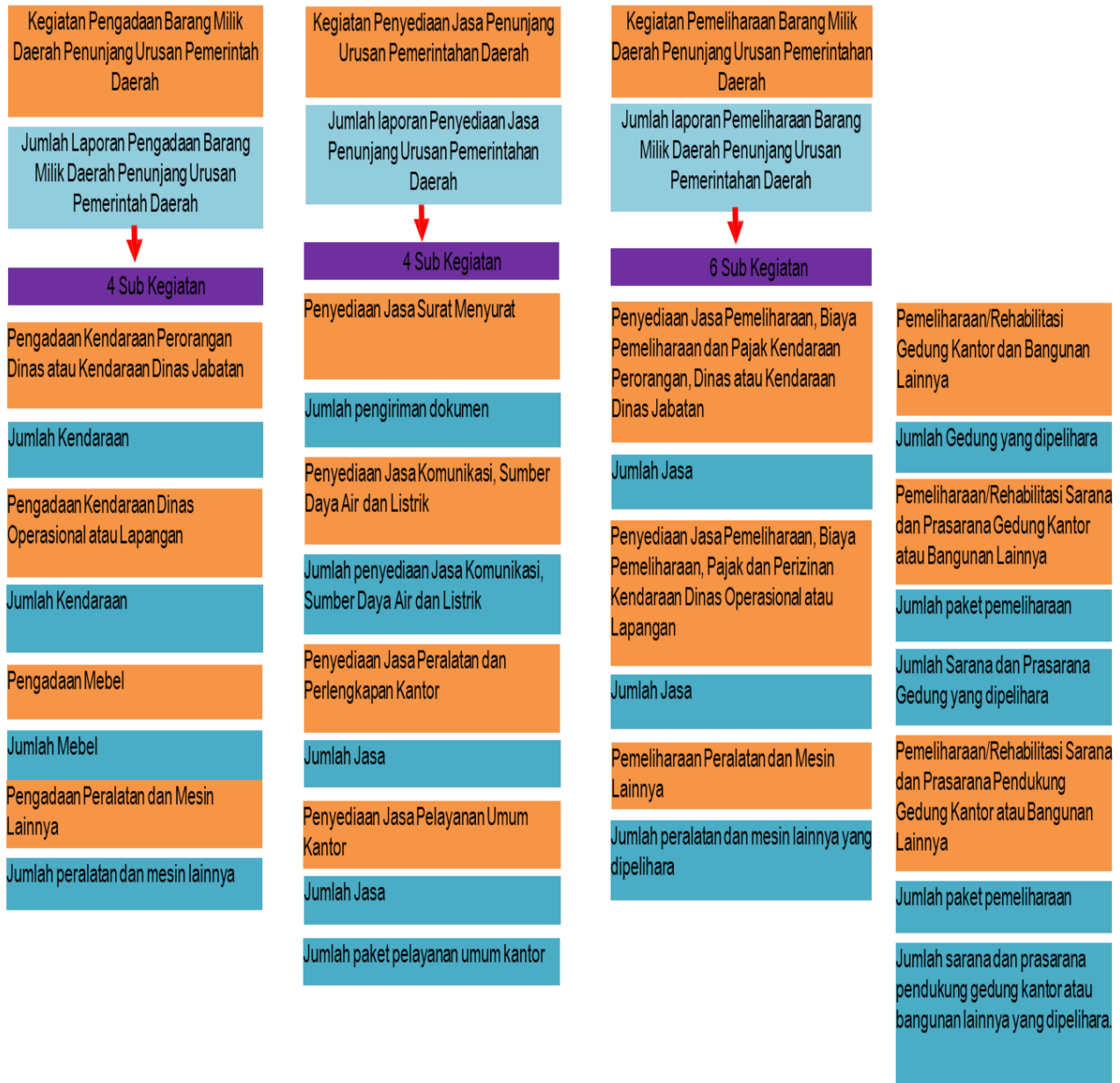
RENJA PERUBAHAN 2025



RENJA PERUBAHAN 2025



RENJA PERUBAHAN 2025



RENJA PERUBAHAN 2025

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Prov. Sulteng
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi,
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program

BAB III. TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Bab ini mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

RENJA PERUBAHAN 2025

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI	%	60	60	60	60			
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2			100	2	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA[1]SKP	Dokumen	3	1	1	100	3	-	-
b.	Kegiatan Administrasi	Meningkatnya Kualitas	100%				100		-	-

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keuangan Perangkat Daerah	dukungan administrasi keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bulan	12	12	12	100	12	-	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Org/bln	12	12	12	100	12		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		5	5	100	5		
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		2	2	100	2		
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Data Barang Milik Daerah pada OPD	%		100					
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Dokumen	2	2	2	100	2	-	-

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perang kat Daerah tahun 2023	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Reallis asi (%)		Capai an Progra m dan Kegiat an s/d tahun berjala n (2024)	Tingka t Capaia n Realis asi Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SKPD	Daerah pada SKPD								
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dan rapat-rapat koordinasi/konsultasi OPD	%		100					
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pket		1	1	100	1		
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota		13	13	100	13		
e.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Administrasi Umum	%		100		100		-	-
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		3	3	100	3		

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perang kat Daerah tahun 2023	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Reallis asi (%)		Capai an Progra m dan Kegiat an s/d tahun berjala n (2024)	Tingka t Capaia n Realis asi Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Layanan Administrasi Umum	%		100	1	100		-	-
1 1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan		12	12	100	12	-	-
13 .	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	100	1	-	-
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	%		100		100		-	-
1 4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14	14	100	14	-	-
II	PROGRAM PENANGGULAN BENCANA	Tercapainya Penanganan bencana di provinsi Sulawesi Tengah	Kab/Kota							

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
h.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tingkat Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana	Kab/Kota		2		-		-	-
15.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen		2	2	100	1	-	-
16.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Peserta		50	50	100	30	-	-
i.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab/Kota				100		-	-
17.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	Dokumen		1	1	100	4	-	-
18.	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan	Kab/org		/50	50	100	115		

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perang kat Daerah tahun 2023	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Reallis asi (%)		Capai an Progra m dan Kegiat an s/d tahun berjala n (2024)	Tingka t Capaian Realis asi Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pencegahan dan Mitigasi Bencana								
20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab/Lokasi/ Org		4 Kab/14 Lokasi/ 40 orang	4 Kab/14 Lokasi/ 40 orang	100	15 Lokasi		
21	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RP3) yang disusun	Kab		2	2	100	2		
j.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab/Kota							
23.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kali		28	28	100	13 Kab/Kota	-	-
25	Penyediaan Logistik Penyelamatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	Paket		4	4	100	1	-	-

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perang kat Daerah tahun 2023	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun 2023	Tingkat Reallisa asi (%)		Capai an Progra m dan Kegiat an s/d tahun berjala n (2024)	Tingka t Capaian Realisa si Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Evakuasi Korban Bencana	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
k.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peangulangan Bencana	Persentase Pendampingan Pasca Bencana	Kab/Kota						-	-
26	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan		1	1	100	1 lapora n	-	-
	Penguatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata kelola kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen		1	1	100	1 dokum en		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

RENJA PERUBAHAN 2025

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 2 (Dua) Program pada Renja Tahun 2023, yaitu meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Prov. Sulteng

Setiap organisasi memerlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan. Pengembangan dan pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagai perspektif penting dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah.

Olehnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tiga fungsi yaitu ; 1) Koordinasi pada saat pra bencana yang meliputi Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan; 2) Komando pada saat bencana dilaksanakan oleh Bidang Tanggap Darurat dan Logistik; 3) serta Pelaksanaan yang meliputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Bencana / Kesiapsiagaan dan Pencegahan

- a) Mendayagunakan dan mengaktifkan posko Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, atau BPBD bagi daerah yang sudah membentuk, beserta perlengkapan penduduk seperti ; Peta Lokasi Bencana, Alat Komunikasi, Tenda Darurat, Genset (alat penerangan), Kendaraan Operasional sesuai dengan kondisi daerah, Dapur Umum berikut perlengkapan logistiknya dan lain-lain.
- b) Melakukan analisis/identifikasi wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resiko rawan bencana.
- c) Melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai upaya yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana
- d) Melakukan pemberian informasi peringatan dini kepada masyarakat
- e) Melakukan gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana baik untuk aparat maupun masyarakat.
- f) Melakukan simulasi menghadapi bencana

2. Saat Terjadinya Bencana Tanggap Darurat dan Logistik

- a) Menjadi (Incident Commander) dalam mengkoordinasi Penanggulangan Bencana,
- b) Meningkatkan peran posko Penanggulangan Bencana selama 24 jam, dengan membentuk "Posko Aju" dilokasi kejadian bencana,
- c) Menggelar operasi penanggulangan bencana dengan mengerahkan sumber daya yang ada di daerah,
- d) Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,
- e) Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan,
- f) Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan,
- g) Penyediaan kebutuhan dasar antara lain air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan,
- h) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya,
- i) Pemulihan dengan segera sarana prasarana vital.

3. Sesudah Terjadinya Bencana /Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan kewenangan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana kegiatan yang dapat dilakukan pada wilayah tersebut, seperti

Kegiatan Rehabilitasi :

- a) Koordinasi Rehabilitasi Pasca bencana
- b) Perbaikan Lingkungan Daerah bencana
- c) Perbaikan Prasarana dan Sarana umum
- d) Pemberian Bantuan, Perbaikan rumah masyarakat
- e) Pemulihan Sosial Psikologis
- f) Pelayanan Kesehatan
- g) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
- h) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya
- i) Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- j) Pemulihan Fungsi Pemerintahan
- k) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Kegiatan Rekonstruksi :

- a) Survey Wilayah Rekonstruksi Pasca Bencana.
- b) Pembangunan kembali prasarana dan sarana
- c) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- d) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- e) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik dan tahan bencana
- f) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat
- g) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- h) Peningkatan fungsi pelayanan public dan
- i) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Adapun kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang selama ini pernah dilakukan adalah :

- a) Mendata korban pengungsi dan korban jiwa,
- b) Mendata kerusakan sarana prasarana pemerintah, rumah penduduk, fasilitas umum, sosial dan lain-lain,
- c) Menyediakan / mengganti surat-surat kependudukan yang hilang / rusak seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lain-lain,
- d) Mengantisipasi dampak wabah penyakit,
- e) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi,
- f) Menyediakan posko trauma center.

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Penanggulangan Bencana sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Prov. Sulteng

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan sistematis, olehnya terdapat berbagai permasalahan utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Permasalahan tersebut terdapat pada tahapan: (1) pra bencana yang menyangkut pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan; (2) pada tahapan saat terjadi bencana yang

menyangkut pada upaya tanggap darurat dan logistik serta peralatan; (3) pasca bencana yang menyangkut pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana. Permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. **Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) Masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul diantaranya: (1) Masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah; (2) Masih terbatasnya pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (3) belum memadainya kerjasama kelembagaan dengan pemerintah daerah, LSM, organisasi non pemerintah dan masyarakat; (4) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berumber dari pemerintah daerah.
2. **Tanggap Darurat, Logistik dan Peralatan**, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: (1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; (2) Belum memadainya kinerja dan koordinasi aparat dalam penanggulangan bencana; (3) Masih rendahnya pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan; (4) Masih rendahnya ketersediaan logistik dan peralatan di daerah; (5) masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat.
3. **Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) Belum adanya basisdata yang termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Belum akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan secara spasial; (4) Belum maksimalnya Koordinasi dalam hal penilaian kerusakan dan kerugian; (5) Belum terencanakannya dengan baik perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; (6) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representase tugas pokok dan fungsi BPBD Propinsi Sulawesi Tengah. Dari rancangan awal yang telah disusun pada BPBD Propinsi Sulawesi

RENJA PERUBAHAN 2025

Tengah telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja badan. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPBD Propinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada BPBD Propinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut :

RENJA PERUBAHAN 2025

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	KET
1	2	3	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya indeks Refomasi birokrasi	100%	11,971,869,214	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	147.447.294	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	72.102.394	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA[1]SKP	2 Dok	55.128.700	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	20.216.200	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dukungan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	11.963.589.081	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ Bulan	9.248.775.181	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	2.308.700.000	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	330.638.400	
	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	75.475.500	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Data Barang Milik Daerah pada OPD	100%	73.704.250	

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	KET
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	73.704.250	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dan rapat-rapat koordinasi/konsultasi OPD	100%	334.081.300	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.814.300	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dok	231.267.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Administrasi Umum	100%	32.000.150	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	109.197.200	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Layanan Administrasi Umum	100%	270.166.550	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	43.700.000	
	- Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	226.466.550	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	63.900.000	

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	KET
	Pemerintahan Daerah				
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	63.900.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tercapainya Penanganan bencana di provinsi Sulawesi Tengah	Kab/Kota	5,356,195,130	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tingkat Pelayanan Informasi di daerah Rawan Bencana	Kab/Kota	171.223.200	
	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	98.922.600	
	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat di Kab/kota yang meningkat ketrampilan dan kemampuannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100org	72.300.600	
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab/Kota	344,247,674.79	
	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Kab/Kota yang terdampingi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana	1 Kab	46.246.500	
	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Lokasi Kawasan rawan bencana yang tertangani	13 Lokasi	253.411.074,79	
	- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	60 org	44.590.100	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab/Kota	498.864.200	
	- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Penanganan Darurat Bencana	1 lap	302.895.500	

RENJA PERUBAHAN 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	KET
	- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 lap	186.968.700	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pendampingan Pasca Bencana	Kab/Kota	8.454.904.432,04	
	- Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sector berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	100 %	8.223.523.482,04	
	- Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah Dokumen Jitu Pasna 13 Kab/kota	1 Dokumen	186.823.300	
	- Pembinaan dan Pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana Kab/kota dalam 1 tahun	13 kab/kota	44.557.650	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

RENJA PERUBAHAN 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program

Yang menjadi Kegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a) **Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**
- b) **Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
- c) **Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

Pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhannya sangat cepat, terkadang menimbulkan konflik lahan yang berakir dengan konflik sosial, padahal dibalik semua itu ada suatu masalah besar yang timbul yaitu Daerah Rawan Bencana, dari berbagai kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa wilayah mempunyai potensi ancaman bencana yang pada hakekatnya semua jenis bencana tersebut dapat disebabkan oleh alam dan non alam serta bencana karena ulah manusia (sosial). Hal tersebut biasanya mengancam kehidupan seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis bagi masyarakat korban bencana. Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Provinsi Sulawesi Tengah, maka diperlukan suatu upaya yang menyeluruh, terpadu, terkoordinasi, dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada saat sebelum terjadi bencana (pra bencana) ketika terjadi bencana (saat bencana) dan sesudah terjadi bencana (pascabencana) maupun bencana yang potensial terjadi dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang ada pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 maka BPBD Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu mengoptimalkan penanggulangan bencana melalui peningkatan peran koordinasi dan mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara Nasional penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Arah kebijakan dan strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal yang telah disinkronisasikan dengan arah kebijakan dan strategi daerah dibidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana tahun anggaran 2025 adalah:

- 1) Mengurangi resiko bencana
- 2) Memberikan jaminan perlindungan social korban bencana
- 3) Menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) secara terpadu
- 4) Menginventarisasi dan mitigasi bencana geologi.
- 5) Menyiapkan logistik dan peralatan.
- 6) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Prov. Sulteng

Rencana Kerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan, serta indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyusunan rencana kerja ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- 2) Untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dan tujuannya adalah :

- 1) Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Adapun tujuan Rencana Kerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui:

- 1) Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha Pengurangan risiko dan mitigasi serta penanganan kedaruratan bencana;
- 2) Membangun sistem informasi penanggulangan bencana di daerah-daerah kabupaten/kota yang rawan bencana;
- 3) Pembentukan wilayah-wilayah penanganan bencana dengan dukungan peralatan dan logistik yang memadai bagi Kabupaten/Kota.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi BPBD Prov. Sulteng, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

- I. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan didukung kegiatan yaitu:**
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan didukung kegiatan yaitu:**
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- III. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- IV. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- V. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
- VI. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
- VII. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengandi dukung kegiatan yaitu:**
 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya,
- VIII. **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**
 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
- IX. **Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- X. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan di dukung kegiatan yaitu:**
 1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

RENJA PERUBAHAN 2025

XI. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana
2. Penguatan Kelembagaan Bencana
3. Pembinaan dan Pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota

Tabel 3 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 . 01.1.03	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi								
05 . 01.1.03. 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Palu	3 Dok	72.102.394	APBD		2 Dok	450.000.000
1.05.01. 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Palu	2 Dok	55.128.700	APBD		2 Dok	150.000.000
1.05.01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang tersusun	Palu	4 Lap	20.216.200	APBD		4 Lap	152.383.692
05 . 01.1.03. 03	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
05 .	Penyediaan Gaji	Jumlah ASN	palu	80 Org	9.248.775.181	APBD	82	1 lap	

RENJA PERUBAHAN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Rencana Tahun 2026	
								Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.1.03. 06	dan Tunjangan ASN	yang terbayarkan gaji dan tunjangannya					Org		9.000.000.000
1.05.01. 1.02.02					2.308.700.000	APBD			2.300.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Tambahan Penghasilan	Palu	80 org					
1.05.01. 1.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah BukuPenatausah aan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD yang Tersusun	Palu	1 Dok	330.638.400	APBD			300.000.000
1.05.01. 1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Keuangan SKPD yang tersusun	Kab/Ko ta	1 Lap	75.475.500	APBD		3 org	250.000.000
1.05.01. 1.06	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.05.01. 1.06.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah pada OPD yang tersusun	palu	2 lap	73.704.250	APBD		2 lap	350.000.000
1.05.01. 1.06.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.05.01. 1.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Palu	1 lap	102.814.300	APBD		1 lap	150.000.000

RENJA PERUBAHAN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Rencana Tahun 2026	
						Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		disediakan							
1.05.01. 1.07.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/K ota dan Luar Daerah	8 Kab/ luar daerah	231.267.000	APBD		8 Kab/ luar daerah	230.000.000
1.05.01. 1.07.06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.05.01. 1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Palu	3 unit	109.197.200	APBD		1 Lap	200.000.000
1.05.01. 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Palu	1 Paket	226.466.550	APBD		1 lap	200.000.00
1.05.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik, Telpo n dan Internet kantor	Palu	1 lap	43.700.000	APBD		1 lap	175.000.000
1.05.01. 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang								

RENJA PERUBAHAN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Rencana Tahun 2026	
						Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Palu	14 unit	63.900.000	APBD		40 unit	100.000.000
	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA								
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								
1.05.03. 1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Toli- Toli	1 Dok	98.922.600	APBD		1 Dok	200.000.000
1.05.01. 1.01.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Masyarakat di Kab/kota yang meningkat ketrampilan dan kemampuann ya dalam pencegahan dab mitigasi bencana	Kab. Toli- Toli	100 Org	72.300.600	APBD		30 Orang	275.000.000,00
1.05.01. 1.01.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana								
1.05.03. 1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalkan	Kab. Toli- Toli	1 Dok	46.246.500	APBD		1 Dok	120.000.000

RENJA PERUBAHAN 2025

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Rencana Tahun 2026	
						Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.05.03. 1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Ko ta yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Toli- Toli	60 Org	44.590.100	APBD		60 Org	44.590.100
1.05.03. 1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Lokasi Kawasan rawan bencana yang tertangani	Kab. Toli- Toli	15 Lok/40 Org	253.411.074,79	APBD		1 Dok	253.411.074,79
1.05.03. 1.02	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
1.05.03. 1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Penanganan Darurat Bencana	palu	1 Lap	302.895.500	APBD		1 Lap	302.895.500
1.05.03. 1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	palu	1 lap	735.542.500.00	APBD		1 lap	735.542.500.00
1.05.03. 1.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
	Koordinasi Penanganan Pasca	Persentase Penvelesaian	Kab/kot a	100 %	8.223.523.482,04	APBD		100 %	8.223.523.482,04

RENJA PERUBAHAN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Cat ata n Pen ting	Perkiraan Maju	
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Rencana Tahun 2026	
						Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Bencana Provinsi	kegiatan pasca bencana disemua sector berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)							
	Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah Dokumen Jitu Pasna 13 Kab/kota	Kab	1 dok	186.823.300	APBD		1 dokume n	186.823.300
1.05.03. 1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub Urusan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana Kab/kota dalam 1 tahun	Kab	13 kab/ko ta	44.557.650	APBD		13 kab/kot a	44.557.650

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

- 1) Koordinasi pada saat pra bencana yang meliputi Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan;
- 2) Komando pada saat bencana dilaksanakan oleh Bidang Tanggap Darurat dan Logistik;
- 3) serta Pelaksanaan yang meliputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

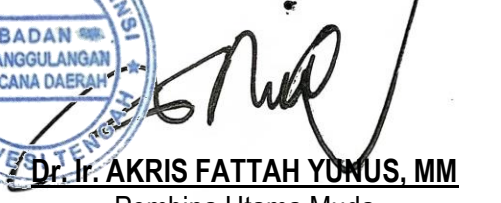
RENJA PERUBAHAN 2025

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Palu , 30 Oktober 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,




Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19671026 199403 1 008